BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional yang menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensinya dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain (Suryokusumo,2004:1). Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga bersifat multi-dimensional yang menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antarbangsa untuk menciptakan perdamaian dallam percaturan politik global serta mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Munculnya *soft power* sebagai salah satu bentuk *power* selain *hard power* dalam kegiatan hubungan internasional membawa implikasi pada pelaksaan diplomasi. *Soft power* menjadi alat utama diplomasi masa kini yang disebut *soft diplomacy*. Kecenderungan pelaksanaan *soft diplomacy* dengan menggunakan aplikasi *soft power* dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan *soft diplomacy* melibatkan berbagai kalangan aktor non-pemerintahan. Oleh karena itu, *soft diplomacy*

merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrument selain tekanan politik, militer, dan tekanan ekonomi yakni dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi. Maka dari itu, platform politik luar negeri dilakukan melalui *soft diplomacy,* seperti apa yang di lakukan oleh Korea Selatan melalui budaya *Korean wave* (Jang, Paik, 2012:201).

Gelombang Korea atau yang lebih dikenal dengan istilah *Korean Wave* atau juga biasa disebut dengan *Hallyu Wave* merupakan istilah yang begitu akrab di telinga masyarakat internasional. *Hanriu* dalam bahasa Cina atau yang kerap disebut *Hallyu* dalam bahasa Korea yang pertama kali dimunculkan oleh seorang jurnalis Cina saat menuliskan maraknya minat akan Korea Selatan beserta produk-produknya di Cina pada pertengahan tahun 1999 (*Korean Culture and Information Service*,2011;20-21). Tidak hanya di kalangan remaja, istilah *Korean Wave* juga merupakan istilah yang begitu akrab dikalangan ibu-ibu serta anak-anak. *Korean Hallyu* merupakan sebuah istilah yang dikeluarkan oleh Korea Selatan untuk mendeskripsikan tentang kebudayaan Korea Selatan yang berhasil di ekspor ke berbagai negara di dunia (Diakses tanggal 15 Maret 2015 melalui http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/Korean-Wave?affairId=209). Mesin penggerak dari Korean *Hallyu* ini sendiri merupakan musik, film, drama, sektor pariwisata, makanan, kebudayaan tradisional dan modern, serta pemasaran produk-produk komersial yang berasal dari Korea Selatan.

Di Jepang, kepopuleran *Hallyu* diawali dengan ditayangkannya serial drama *Winter Sonata* atau disebut *Gyeoul Yeonga* dalam bahasa Korea pada tahun 2003. 12 Drama serial *Winter Sonata* pertama kali disiarkan di Jepang melalui

stasiun televisi NHK (*Nippon Hoso Kyokai*), disiarkan dengan menggunakan bahasa Korea dan diterjemahkan ke bahasa Jepang (Diakses tanggal 15 Maret 2015 melalui http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111230000497). Hal itu dilakukan agar orisinalitas dan atmosfir dari drama film tersebut tetap terbangun bagi penonton. Drama *Winter Sonata* ini pun mendapatkan *encore runs,* drama ini diulang ke 4 kalinya pada tahun 2005 (*Korean Culture and Information Service*,2011;23). Populernya drama serial *Winter Sonata* di Jepang, menyebabkan aktor di drama tersebut Bae Yong-Joon, Choi Ji-woo, dan Park Yong-ha menjadi bintang besar di Jepang. Bae Yong Joon secara khusus sangat digemari oleh para wanita Jepang. Drama serial ini sangat diminati oleh mayarakat Jepang karena jalan ceritanya yang sederhana dan terlebih karakter laki-laki korea yang digambarkan dengan baik, tampan dan romantis. Suksesnya drama *Winter Sonata* di Jepang memberikan penerangan baru tentang gaya hidup, karateristik, dan pengembangan hiburan di bidang bisnis, seni, musik mendapat pengakuan dan popularitas juga di dunia.

Pada tahun 1997, Korea Selatan diguncang krisis finansial, hingga Korea Selatan terpaksa menerima dana pinjaman dari IMF untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya. Sebenarnya, rakyat Korea Selatan menolak secara besar-besaran pinjaman ini karena mereka anggap sebagai penghinaan nasional (Muchhala,2007:30).

Di tengah krisis, Presiden Korea Selatan pada saat itu, Kim Dae Jung menemukan sebuah peluang untuk membantu Korea Selatan lepas dari krisis. Peluang tersebut adalah kemunculan budaya populer *Hallyu* yang terlebih dahulu

meraih popularitas tinggi di Cina. Kim Dae Jung yang disebut President of Culture, mulai mengembangkan industri budaya Korea Selatan dengan mengeluarkan kebijakan *The Basic Law of Cultural Industry Promotion* pada tahun 1999 dan menggelontorkan dana sebesar $ 148,5 juta. Sejak saat itu, *Hallyu* menjadi simbol industri budaya Korea Selatan. *Hallyu* berhasil meningkatkan ekspor Korea Selatan yang pada akhirnya membawa keuntungan ekonomi untuk Korea Selatan (Sungeun,2008:214).

Upaya Kim Dae Jung untuk mengembangkan *Hallyu* dilanjutkan pada tahun 2001, Kim Dae Jung bekerjasama dengan kementrian budaya dan pariwisata untuk membangun *Korea Creative Content Agency* (KOCCA). KOCCA didirikan Kim Dae Jung sebagai agen kebijakan yang menjadikan budaya sebagai prioritasnya, dengan tujuan untuk mempromosikan industri budaya Korea Selatan dan mengembangkannya ke pasar dunia (James,2008:112). Pada akhirnya tahun 2005 pemerintah Korea Selatan mengakui *Hallyu* sebagai bagian dari diplomasi budayanya, melalui *White Paper 2006* Korea Selatan menjelaskan bahwa kebijakan luar negerinya di tahun 2005 adalah meningkatkan citra nasional Korea Selatan melalui *Korean Wave*. Hal ini berkaitan dengan upaya *Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MOFAT) melakukan diplomasi publik dengan cara meningkatkan aktivitas dan promosi budaya demi mencapai tujuan nasional yang lebih besar, yaitu peningkatan citra nasional Korea Selatan sebagai negara pelopor di bidang budaya (MOFAT,2011:25). *White Paper 2006* telah menjelaskan bahwa *Hallyu* adalah bagian dalam diplomasi budaya Korea Selatan dan bertugas memperkenalkan Korea Selatan ke masyarakat internasional.

Korea Selatan percaya bahwa diplomasi saat ini tidak hanya menjadi tugas diplomat professional semata, namun keterlibatan para pelaku bisnis bersama dengan masyarakat juga memainkan peran penting, dalam hal ini peran para selebritis tentunya dianggap akan lebih menarik karena mereka sudah dikenal oleh masyarakat sehingga berkontribusi untuk meningkatkan hubungan luar negeri Korea Selatan. Pelaksanaan strategi dengan mengembangkan sikap profesionalisme melalui keterlibatan para aktor non-negara dalam pelaksanaan *Soft Diplomacy* juga akan sangat membantu meningkatkan sektor pariwisata yang secara otomatis pengaruhnya dapat meningkatkan sektor perekonomian Korea Selatan.

Penggunaan teknologi media komunikasi dan informasi menjadi salah satu strategi penting yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan karena menjadi bagian terintegrasi dari pelaksanaan *Soft Diplomacy* tersebut. Teknologi media informasi mendorong penyebaran budaya Korea bersama dengan *Hallyu* yang semakin luas dan cepat dari berbagai mainstream media.

Pemerintah Korea Selatan menyusun strategi dengan menggunakan jalur diplomasi media untuk memanfaatkan kemajuan industri teknologi informasi dalam mengembangkan kebudayaan Korea. Hal tersebut akan mudah terlaksana mengingat Korea Selatan adalah salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi informasi, digitalisasi dan memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Perkembangan teknologi media massa memungkinkan akses informasi dengan mudah dan biaya rendah dengan memanfaatkan internet tanpa

halangan birokratis dan dapat memberikan pengaruh yang lebih cepat dan luas ke seluruh lapisan masyarakat di dunia (Jang, Paik, 2012:196-202).

Seiring bergantinya pemimpin dan besarnya keingintahuan masyarakat internasional terhadap budaya Korea Selatan, *Hallyu* dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk melakukan diplomasi budaya di seluruh dunia. Diplomasi merupakan instrumen *soft power* dari politik luar negeri dan digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara.

K-pop (*Korean Pop*), adalah jenis musik yang berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musik pop Korea yang sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara (Lie,2012:339). Sama halnya di Jepang, penyanyi K-pop pertama yang menembus pasar Jepang adalah Kwon Boa (BoA). BoA merilis album pertama di Jepang pada tahun 2001, BoA sangat sukses di pasar Jepang dengan melakukan konser-konser langsung di berbagai kota di Jepang. BoA menjadi artis asing pertama yang mencapai nomor satu di album tangga lagu mingguan *Oricon* Jepang tujuh kali dengan albumnya yang berjudul *Listen to My Heart* (*Korean Culture and Information Service*,2011;31). Setelah kesuksesan BoA di Jepang,dilanjutkan dengan kesuksesan boyband asal Korea Selatan TVXQ (Tohoshinki), TVXQ merupakan salah satu artis Asia tersukses yang pernah ada. TVXQ telah diberi gelar sebagai "Bintang Asia" (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://news.nate.com/view/20110512n04886?mid=e0101). TVXQ menempati puncak tangga lagu mingguan *Oricon* sebanyak 9 kali, termasuk singel terbaru mereka saat itu, "*Keep Your Head Down*" dari album dengan nama yang sama di

Jepang yang telah memperpanjang rekor mereka sebagai artis asing dengan *single* paling banyak menempati peringkat pertama di Jepang (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://www.soompi.com/2011/02/01/tvxq-ranks-1-on-japans-oricon-weekly-chart-by-selling-over-231000-singles-1/).

Popularitas artis-artis drama dan penyanyi Korea Selatan di Jepang berpengaruh juga dalam perkembangan *Hallyu* di Jepang dan dunia, contohnya dalam bidang pariwisata, berkat majunya sektor industri musik dan industri perfilman, hal ini sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Korea Selatan. Hal itu didasari oleh drama-drama Korea yang mengambil lokasi *Shooting* di kawasan ataupun daerah yang unik, berbeda dari tempat lain dan memiliki pemandangan alam yang indah (Diakses tanggal 20 Mei 2015 melalui http://pengenliburan.com/5-tempat-wisata-lokasi-drama-korea.html). Sama halnya dengan industri makanan dan barang-barang Korea, berkat majunya industri perfilman, hal inipun sangat berpengaruh terhadap industri makanan Korea Selatan. Hal itu didasari oleh drama-drama Korea dan iklan-iklan Korea yang dibintangi oleh aktor aktris dan Penyanyi / *Idol* yang makan makanan tradisional Korea dan memakai berbagai barang buatan Korea. Hal ini membuat masyarakat internasional secara tidak langsung jadi penasaran dan ingin mencoba makanan tradisional Korea dan membeli barang-barang buatan Korea. Berkat *Hallyu* dan ketertarikan masyarakat akan *Hallyu,* sekarang telah banyak dibuka restoran makanan Korea Selatan dan Toko pernak-pernik khas Korea Selatan di dunia (*Korean Culture and Information Service*,2011;30).

Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan bilateral. Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang dipengaruhi oleh sengketa pulau Dokdo/Takeshima yang disengketakan oleh kedua negara sejak tahun 1904. Korea Selatan mempunyai kepentingan dipllomasi budaya melalui *Hallyu. Hallyu* sendiri telah berkembang di dunia termasuk di Jepang. Di Jepang sendiri perkembangan *Hallyu* dipengaruhi oleh sengketa yang khususnya memanas kembali di tahun 2012. Pada tahun 2012, terjadi sengketa antara Korea Selatan dan Jepang, dikarenakan kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak ke Pulau Dokdo/Takeshima. Status Pulau Dokdo/Takeshima diantara Korea Selatan dan Jepang yang dipersengketakan kedua negara adalah status kedaulatannya, dimana kedua negara mengklaim berdasarkan konektivitas secara geografis dan historis atas kepemilikan pulau tersebut.

Sejarah persengketaan Pulau Dokdo disebut oleh Korea Selatan atau disebut juga dengan Takeshima oleh negara Jepang merupakan isu yang didasari oleh sejarah kolonialisme Jepang terhadap Korea. Jepang mengklaim bahwa pulau Dokdo atau Takeshima tersebut adalah milik Jepang berdasarkan perjanjian yang pernah dilakukan oleh kedua negara pada saat masa kolonialisme. Terdapat juga isu lainnya yang didasari dari sejarah kedua negara yaitu isu mengenai wanita-wanita Korea Selatan yang pada saat Perang Dunia Kedua dijadikan budak seks oleh tentara Jepang (Diakses tanggal 13 Maret 2015 melalui http://csis.org/files/publication/1203qjapan_korea.pdf).

Perebutan suatu kepulauan oleh beberapa negara memang menjadi masalah yang rumit. Perebutan suatu negara terhadap suatu wilayah negara lain

sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan antara negara yang sama-sama memiliki klaim atas wilayah yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002, 1073), negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Seperti yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan atas klaim Kepulauan Dokdo atau Takeshima (Diakses tanggal 13 Maret 2015 melalui http://www.bbc.com/news/world-asia-19207086).

Dokdo/Takeshima adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang (pada 37º 14 26,8" N dan 131º 52 10,4" E). Sebenarnya, Dokdo/Takeshima bukan merupakan suatu pulau tapi gugusan pulau. Dokdo/Takeshima terdiri dari dua pulau utama, yaitu Dongdo (Pulau Timur) dan Seodo (Pulau Barat). Kawasan Dongdo adalah 73297 m², dan Seodo memiliki luas 88639m jadi total luas kawasan Dokdo/Takeshima 187.453 m². Pulau ini merupakan suatu kawah yang berasal dari ledakan vulkanis yang berbentuk karang yang dijadikan sebagai tempat perlindungan burung laut petrel, burung camar dan terdapat beberapa tumbuhan endemik. Pulau ini juga terkenal akan kekayaan biota laut dan sumber daya gas alam yang terdapat disekitarnya (Diakses tanggal 13 Maret 2015 melalui http://www.dokdo-takeshima.com/). Dokdo/Takeshima memiliki ekosistem yang unik. Memproduksi sejumlah kecil air tawar, permukaan gunung berapi, menjadi habitat dari 49 jenis tanaman, 107 jenis burung, dan 93 jenis serangga. Disekitar Pulau, arus dingin dan hangat

memenuhi arus laut, yang juga merupakan tempat bagi berbagai macam komunitas dan organisme laut, termasuk anjing laut dan terdapat 100 lebih jenis ikan (Diakses tanggal 14 Maret 2015 melalui http://www.kdi.re.kr/infor/ep_view.jsp?num=81035). Penampilan fisik atas Pulau ini sangat mengesankan kedua negara dan dianggap mencerminkan kepribadian kedua negara secara simbolik. Sehingga muncullah perdebatan kepemilikan atas pulau Dokdo/Takeshima yang mencakup batas-batas kewilayahan secara maritim termasuk penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Salah satu alasan Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo/Takeshima berada di bawah kedaulatannya berdasar pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa pulau Dokdo/Takeshima pada awalnya merupakan suatu *independent island* yang dinamakan *Ussankuk* dan telah bersatu dengan Korea pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 M.

Pada tahun 1618 warga Jepang sudah memulai perburuan singa laut dan pemanfaatan kayu serta bambu di wilayah Ulengdo dan Dokdo/Takeshima. Bahkan pada tahun 1661, pemerintah Jepang telah memberikan ijin kepada warganya untuk melakukan perjalanan ke Takeshima.

Jepang menganeksasi semenanjung Korea sekitar tahun 1904, dikarenakan kebutuhan akan sumber daya alam Korea dan keinginannya untuk membangun imperium Jepang yang lebih luas. Pada awalnya hubungan Korea dan Jepang hanya berdasarkan pada hubungan dagang/ekonomi. Pemerintah Korea yang pada saat itu dipegang oleh kerajaan Choson membangun pemukiman untuk warga

Jepang di tiga pelabuhan di Korea Selatan. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan perdagangan Korea bisa lebih meningkat. Namun hal itu menjadi bumerang bagi Korea, dengan memanfaatkan kondisi kacau di dalam negeri Korea karena perebutan kekuasaan, Jepang pun melakukan serangan. Korea salah perhitungan akan serangan Jepang tersebut. Korea menganggap serangan Jepang tidak akan mempengaruhi wilayah Korea karena kondisi dalam negeri Jepang yang juga sedang kacau karena perebutan kekuasaan. Korea tidak mempersiapkan diri untuk melawan serangan tersebut dan Jepang dapat dengan mudah mengakhiri 518 tahun pemerintahan Choson.

Korea menandatangani perjanjian pendudukan dengan Jepang pada 22 Agustus 1910. Berdasarkan hal tersebut, secara otomatis Korea berada dalam kendali Jepang. Sebelumnya pada tahun 1904, Korea menandatangani sebuah perjanjian dengan Jepang. Pada perjanjian itu, Korea mutlak dalam kendali Jepang. Segala urusan diplomatik dan pemerintahan berada dibawah kekuasaan Jepang dan Korea menjamin untuk memberikan wilayahnya kepada Jepang jika dibutuhkan untuk kebutuhan perang Jepang (Yang & Nur,2003:137-138).

Alasan lain yang diberikan Jepang untuk menantang klaim Korea Selatan atas Kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima berupa bukti akan perjanjian pendudukan Jepang atas Korea. Pada saat penandatanganan perjanjian pendudukan Jepang atas Korea, secara otomatis wilayah Korea merupakan bagian dari wilayah jajahan Jepang. Namun, ada satu poin yang dianggap Jepang penting untuk mengklaim pulau Dokdo/Takeshima tidak termasuk dalam wilayah Korea

adalah keyakinan pulau Dokdo/Takeshima ini dianggap sebagai daerah tidak bertuan (*Terra Nulius*).

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, secara otomatis wilayah yang dulu menjadi wilayah jajahan Jepang dikembalikan kepada negara/wilayah yang berkuasa sebelumnya. Hal ini tertuang dalam perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Fransisco tanggal 8 September 1951, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang menunjukan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Dalam perjanjian San Fransisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal.

Wilayah Dokdo/Takeshima merupakan wilayah yang dipersengkatakan oleh Korea Selatan karena kepemilikannya. Berdasarkan pada perjanjian San Fransisco, kepulauan Dokdo/Takeshima tidak termasuk kedalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang. Pada pasal 2 perjanjian San Fransisco hanya dibicarakan pengembalian wilayah Pulau Kuril dan Senkaku pada Rusia. Hal ini dapat diartikan sebagai legalitas Jepang untuk memiliki pulau Dokdo/Takeshima (Diakses tanggal 14 Maret 2015 melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_zoom.htm?no=4370&current_page=15).

Pada tanggal 22 Juni 1965, ketegangan antara kedua Korea Selatan dan Jepang diredam dengan ditandatanganinya Traktat Hubungan Dasar *(Treaty on Basic Relations)* di Tokyo (Man,2000). Traktat yang ditambah sejumlah perjanjian ini memuat segala hal yang dimaksudkan untuk menormalisasikan

hubungan negara yang terlibat didalamnya dengan salah satunya mengenai sengketa pulau Dokdo/Takeshima (Man,2000). Dikatakan didalamnya bahwa: kedua negara akan mengakui adanya klaim satu sama lain atas pulau yang bersangkutan; mendengarkan argumen satu sama lain; akan menyelesaikan permasalahan ini di masa yang akan datang; Untuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kedua negara dapat menggunakan pulau Dokdo/Takeshima untuk menandai wilayah mereka sementara wilayah yang tumpang tindih akan dianggap sebagai wilayah gabungan; Korea Selatan diizinkan untuk melanjutkan pemerintahannya atas pulau yang bersangkutan selama jumlah kehadiran polisi tidak meningkat dan tidak ada fasilitas baru yang dibangun di pulau tersebut; dan yang terakhir adalah kedua negara akan memegang teguh traktat ini (Philip,2013:5).

Pada tahun 2006, Jepang kembali mempertegas klaimnya dengan cara memasukan kepulauan Dokdo/Takeshima kedalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang, hal ini bertujuan untuk pengenalan kepada anak-anak sekolah menengah. Selain bertujuan untuk pengenalan anak sekolah menengah, memasukan wilayah Takeshima kedalam buku pelajaran sekolah menengah Jepang juga memiliki makna bahwa Jepang adalah pemilik atas kepulauan Takeshima, bukan Korea Selatan atau negara manapun (Diakses tanggal 14 Maret 2015 melalui http://www.wsws.org/en/articles/2006/05/japa-m03.html).

Pada setiap tanggal 2 Februari dirayakan hari Takeshima oleh Jepang, Takeshima merupakan sebutan Jepang untuk pulau Dokdo/Takeshima. Secara historis, kepulauan Takeshima merupakan wilayah kedaulatan Jepang, hal ini

dibuktikan dengan masuknya Takeshima dalam kedaulatan Jepang sejak masa Edo sekitar tahun 1603-1868 (Diakses tanggal 14 Maret 2015 melalui http://www.dokdo-takeshima.com/japans-mofas-propaganda-brochure.html).

Puncaknya pada tahun 2012 dimana bersamaan dengan adanya perkembangan *Hallyu* di Jepang, Ketegangan Korea Selatan-Jepang kembali terjadi, dikarenakan kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak ke Pulau Dokdo/Takeshima. Kunjungan Lee Myung-bak merupakan kunjungan presiden Korea Selatan yang pertama kalinya ke Pulau Dokdo/Takeshima. Di Korea Selatan, kunjungan itu dianggap penuh makna oleh partai Lee Myung-bak yang berkuasa dalam rangka membela wilayah Korea Selatan. Jepang memiliki anggapan berbeda tentang kunjungan tersebut. Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda mengatakan pada wartawan bahwa kepulauan kecil itu adalah "wilayah kedaulatan kita". Dengan adanya kunjungan presiden Korea Selatan Lee Myung-bak ke pulau Dokdo/Takeshima pada Jumat 10 Agustus 2012, peristiwa ini memicu Jepang untuk menarik duta besarnya untuk Korea Selatan (Diakses tanggal 14 Maret 2015 melalui http://www.bbc.com/news/world-asia-20038776). Peristiwa ini berdampak terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang.

Melihat kembali pada tahun 1996, masalah sengketa pulau Dokdo/Takeshima yang melibatkan *Hallyu* telah terjadi di tahun tersebut, penyanyi Jung Kwang Tae yang menyanyikan lagu berjudul *"Dokdo Is Our Land"*, dia meminta visa Jepang bersamaan dengan kru-produksi stasiun Televisi SBS *(Seoul Broadcasting System)* untuk acara spesial yang dilakukan di Jepang. Namun, Jung Kwang Tae satu-satunya orang dari grup tersebut yang visanya

ditolak oleh Jepang karena masalah sengketa pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://onehallyu.com/topic/116191-soompi-japan-tensions-heating-up-again-singer-refused-entry-into-japan-over-dokdo/).

Pada tahun 2011, K-Pop Grup BEAST dan C.N.Blue melakukan perjalanan ke Jepang untuk konser, mereka tertahan di bagian imigrasi bandara Jepang selama lebih kurang 8 jam, mereka tertahan karena tidak memiliki visa yang dibutuhkan. Namun, agensi BEAST dan agensi C.N.Blue yang ada di Jepang menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan visa dalam rangka kunjungannya ke Jepang untuk konser. Berita Harian Televisi Jepang pada hari itu menyatakan sedang ada gesekan antara Korea Selatan dan Jepang terkait Pulau Dokdo/Takeshima (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://news.nate.com/view/20141111n13266?mid=n1008). Seperti dikutip Soompi.com BEAST mengatakan pada tahun 2010 "Dokdo adalah wilayah milik Korea Selatan" pada sebuah acara di Los Angeles Amerika Serikat. (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://www.soompi.com/2012/08/29/8-korean-celebrities-labeled-anti-japanese-for-their-position-on-dokdo/6/).

Kasus selanjutnya dialami oleh Aktris Kim Tae Hee pada tahun 2011, Kim Tae Hee sangat dibenci di Jepang setelah diberitakan perannya di drama Jepang yang berjudul *"99 Days with a Star".* Faktanya, lebih dari 500 warga Jepang yang marah terhadap drama yang dibintangi oleh Kim Tae Hee melakukan protes dan lebih dari 20.000 orang menandatangani petisi online untuk melarang Kim Tae Hee berakting dalam drama Jepang yang berjudul *"99 Days with a Star"*. Alasan

warga Jepang melakukan protes adalah pada tahun 2005 Kim Tae Hee dan adiknya melakukan kegiatan *"Love Dokdo Campaign"* di Swiss, sebagai duta kehormatan dari Korea Selatan untuk Swiss (Diakses tanggal 16 Maret 2015 melalui http://seoulbeats.com/2011/10/japans-fight-against-kim-tae-hee/).

Setelah kunjungan pertama Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak ke Pulau Dokdo/Takeshima pada 12 Agustus 2012. Aktor Korea Selatan Song Il Guk, pada tanggal 15 Agustus 2012 mengikuti kegiatan *"Swim to Dokdo",* yaitu berenang secara estafet ke Pulau Dokdo/Takeshima. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Korea Selatan. Setelah event ini selesai, perusahaan televisi satelit Jepang menunda siaran drama Korea, yang dibintangi Aktor Song Il Guk. Terlebih lagi, wakil menteri luar negeri Jepang Tsuyoshi Yamaguchi mengumumkan, "Saya meminta maaf, tapi ini akan menjadi sulit untuk dia (Song Il Guk) untuk datang ke Jepang mulai saat ini. Saya merasa bahwa inilah yang masyarakat Jepang rasakan" (Diakses pada tanggal 16 Maret 2015 melalui http://www.soompi.com/2012/08/29/political-tension-over-dokdo-leads-to-boycotting-hallyu-in-japan/).

Dalam memperoleh referensi ilmiah untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sumber literatur yang memiliki kesamaan dengan tema yang diteliti oleh peneliti. Dalam studi ilmu hubungan internasional, belum banyak yang mengangkat konflik antar negara yang berpengaruh terhadap perkembangan budaya, kebanyakan dari peneliti-peneliti lebih banyak meneliti konflik antar negaranya saja dan tidak membahas pengaruh budayanya. Dari sekian banyak karya ilmiah yang peneliti dapatkan, yang pertama berjudul *"Pengaruh Sengketa*

Pulau Dokdo/Takeshima di Semenanjung Korea Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Jepang" sumber Illa Siti Jamila, Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Penelitian tersebut mengemukakan bahwa masalah ketidakjelasan batas-batas negara dan status suatu wilayah merupakan bagian permasalahan "sengketa" diantara negara-negara yang memiliki letak geografis berdekatan dan berbatasan. Seperti halnya negara-negara di kawasan Asia Timur yang mengalami konflik persengketaan mengenai ketentuan batas-batas teritorial dan status akan pulau-pulau yang berada di Semenanjung Korea Khususnya.

Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang terjadi pada tahun 1905 dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan ini diawali dengan status kedaulatan pulau Dokdo/Takeshima yang terletak di Semenanjung Korea dan diakui kedaulatannya dibawah kekuasaan teritorial Korea di bawah kepemimpinan Dinasti Shilla pada 512 M, namun sejak tahun 1905-1945 Jepang mulai melakukan imperialisasi atas wilayah Korea dan seluruh daerah Semenanjung Korea yang berdampak pada diakuinya pulau Dokdo/Takeshima sebagai "pulau takeshima" berada di bawah yuridiksi Dewan Prefektur Shimane sejak tahun 1905. hal ini dinilai dapat mempengaruhi pola Hubungan Bilateral diantara Korea Selatan dan Jepang khususnya dalam aspek hubungan diplomatis antar kedua negara yang berdampak pada beberapa sektor seperti kegiatan perdagangan, aktivitas kebudayaan, dan berdampak pula pada pelaksanaan konsep kerjasama diantara kedua negara dalam menghadapi era

globalisasi terutama dalam menghadapi ”perdagangan bebas” (Diakses tanggal 25 Maret 2015 melalui http://www.koreaaward.com/kor/dokdo_profile).

Peneliti mengungkapkan bahwa kasus sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang disikapi secara akomodatif pada pola hubungan bilateral antar kedua negara yang ditandai adanya jalur diplomasi untuk membantu tahapan normalisasi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Studi Hubungan Internasional dan secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penggambaran akan sengketa pulau dokdo/takeshima dalam hal pembuatan kebijakan dari masing-masing negara guna mensikapi proses penyelesaian sengketa juga mendinamisasikan kembali pola hubungan bilateral diantara kedua negara.

Lalu penelitian yang kedua berjudul *“Diplomasi Budaya Korea Selatan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia”* sumber Leonardo, Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hubungan yang saling melengkapi antara Korea Selatan-Indonesia. *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* dipercaya sebagai puncak hubungan kedua Negara ini. Salah satunya dibahas mengenai kerjasama dibidang sosial budaya. Korea Selatan mempunyai

Hallyu yang merupakan segala bentuk kebudayaan Korea Selatan. Korea Selatan menjadikan *Hallyu* sabagai bagian dari diplomasi budayanya di negara lain, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

Diplomasi Budaya Korea Selatan dan Implikasinya terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia. Sehingga peneliti mencoba untuk menganalisis dari tujuan, kendala, kondisi sebelum, kondisi sesudah dan prospek kedepan. Skripsi ini menunjukan adanya perubahan makna *Hallyu* sebelum dan setelah diberlakukan sebagai bagian dari diplomasi Korea Selatan. Dari kurun waktu 2005-2013 hubungan antara kedua negara semakin dekat karena diperlancar dengan kerjasama dibidang kebudayaan. Tetapi sekarang Korea Selatan khawatir karena di Indonesia mulai muncul pihak-pihak yang sulit menerima kehadiran *Hallyu*.

Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa *Hallyu* dijadikan Korea Selatan sebagai instrumen *soft diplomacy* untuk melancarkan negosiasi dengan Indonesia dengan demikian negosiasi kerjasama diberbagai bidang dapat berjalan lancar terutama dibidang ekonomi dan pariwisata.

Dari penelitian yang berjudul *"Pengaruh Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima di Semenanjung Korea Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Jepang"* oleh Illa Siti Jamila memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti, persamaannya adalah membahas objek penelitian yang sama yaitu sengketa pulau Dokdo/Takeshima, dan perbedaannya adalah penelitian Illa Siti Jamila tidak membahas dampak sengketa pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatan dan Jepang terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang. Lalu dari penelitian yang berjudul *"Diplomasi Budaya Korea Selatan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan-Indonesia"* sumber Leonardo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti

teliti, persamaannya adalah membahas budaya Korea Selatan *"Hallyu"* dan perkembangannya di suatu negara, dan perbedaannya adalah penelitian Leonardo tidak membahas tentang sengketa pulau antar negara.

Berdasarkan klaim kedua negara tersebut diatas, dan pengaruhnya terhadap *Hallyu* Wave di Jepang maka peneliti tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikannya melalui judul: "**DAMPAK SENGKETA PULAU DOKDO/TAKESHIMA KOREA SELATAN-JEPANG TERHADAP PERKEMBANGAN *HALLYU* DI JEPANG TAHUN 2012-2015**"

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Timur, merupakan landasan dalam mempelajari karakteristik Korea Selatan dan Jepang.
2. Studi Keamanan Internasional, merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji sengketa dan konflik dalam keamanan Internasional.
3. Diplomasi dan Negosiasi, sebagai Acuan dasar bagi peneliti dalam memahami politik luar negeri suatu negara dan mengkaitkannya dalam subjek penelitian ini.
4. Sosiologi dan Antropologi, merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji dinamika masyarakat dan kebudayaan yang berkaitan dengan fenomena yang diangkat oleh peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya. maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana dampak sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Hallyu* di Jepang pasca kembali memanasnya sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2012?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang pasca kembali memanasnya sengketa Pulau Dokdo/Takeshima di tahun 2012?
3. Bagaimana perkembangan dan prospek *Hallyu* di Jepang kedepannya?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Persoalan sengketa pulau Dokdo/Takeshima sudah sejak lama menggangu hubungan bilateral Korea Selatan-Jepang, sejak tahun 1905 persoalan sengketa pulau Dokdo/Takeshima ini tidak kunjung selesai. Permasalahan sengketa ini sangat mengganggu hubungan bilateral kedua negara hingga saat ini. Penelitian ini mengambil pembatasan pada Agustus 2012-April 2015, karena pada Agustus 2012 ada beberapa peristiwa yang memicu kembali memanasnya hubungan antara Korea Selatan-Jepang, awalnya adalah kunjungan presiden Korea Selatan Lee Myung Bak ke pulau Dokdo/Takeshima, kunjungan Lee Myung Bak merupakan kunjungan presiden Korea Selatan yang pertama kalinya ke pulau Dokdo/Takeshima. Dengan adanya kunjungan presiden Korea Selatan ke pulau Dokdo/Takeshima ini, Jepang menarik duta besarnya untuk Korea Selatan untuk beberapa waktu. Penarikan duta besar Jepang untuk Korea Selatan otomatis memberikan dampak ke masyarakat Jepang dan perkembangan *Hallyu* di Jepang, yang sejak beberapa tahun ini sudah merambah negara-negara di dunia termasuk Jepang.

Hallyu Wave di Jepang pada tahun 2012 sangat digemari. Bersamaan dengan munculnya persitiwa kunjungan presiden Korea Selatan dan pernyataan pemerintah Jepang yang menarik duta besarnya untuk Korea Selatan, sehingga peristiwa ini pun berdampak pada *Hallyu Wave* di Jepang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dampak sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan *Hallyu* di Jepang pasca kembali memanasnya sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2012
b. Untuk mengetahui apa saja hambatan terhadap perkembangan *Hallyu* di Jepang pasca kembali memanasnya sengketa Pulau Dokdo/Takeshima di tahun 2012
c. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan dan prospek *Hallyu* di Jepang kedepannya

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini di harapkan, akan memperoleh dan menambah pengetahuan peneliti mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Sebagai dedikasi peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan Negara Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
b. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umum.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia.